



REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah dapat diselesaikan.

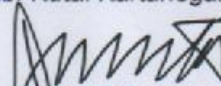
Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renstra Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 melalui pelaksanaan visi dan misi serta penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Dalam penyusunan Renstra ini, kami Badan Pendapatan Daerah menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kesalahan – kesalahan dan kekurangan – kekurangan, oleh karena itu kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya.

Akhir kata, semoga penyusunan Renstra ini dapat memberikan manfaat dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan kedepannya.

Tenggarong, April 2019
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Kutai Kartanegara



Ir. H. TOTOK HERU SUBROTO, M.Si
NIP. 19630827 199003 1 012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB	Halaman
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya	II-7
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	II-8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	II-27
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3. Penentuan Isu- Isu Strategis.....	III-6
IV. TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
VIII. PENUTUP	VIII-1

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam matriks tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Namun demikian, seiring dengan dinamika yang berkembang, lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap tatanan isi Renstra PD. Dalam Pasal 272 UU Nomor 23 tahun 2014 diatur bahwa:

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- 3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Menteri Dalam Negeri selanjutnya menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa Rencana Strategis PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya telah menyusun dokumen renstra 2016-2021, dan penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Namun demikian, memasuki pelaksanaan tahun kedua, terjadi perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Perubahan RPJMD tersebut didasari oleh: (1) adanya gejolak perekonomian global yang berimbas pada perekonomian nasional dan fiskal; (2) berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016; (3) terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan (4) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan RPJMD Kutai Kartanegara 2016-2021 tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Implikasi dari adanya perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan review Renstra 2016-2021. Renstra Badan Pendapatan Daerah yang disusun ini berpedoman RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 (perubahan), dan telah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi internal Badan Pendapatan Daerah serta dengan para pemangku kepentingan. Keterlibatan pihak-pihak dalam penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- (8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- (11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor.... Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor.... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021/*Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor.... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021*
- (13) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau program kerja tahunan dan lima tahunan, serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tujuannya adalah:

- (1) Memudahkan seluruh jajaran manajemen dan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD

- (2) Sebagai alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun; dan
- (3) Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program/kegiatan yang ditetapkan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, dan kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab II

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sebelum dibentuk menjadi Badan Pendapatan Daerah, instansi pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Maka di daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyesuaian struktur kelembagaan, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Implikasi dari Peraturan Daerah tersebut diantaranya adalah perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, dan hal ini diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tersebut, kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

- (1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- (2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- (3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- (4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas:
 - (a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan
 - (b) Merumuskan kebijakan teknis Badan
 - (c) Merumuskan rencana program kerja Badan
 - (d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program badan
 - (e) Merumuskan kebijakan administrasi badan
 - (f) Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi badan
 - (g) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (h) menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - (i) mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Badan
 - (j) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sekretaris, mempunyai tugas:
 - (a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - (b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian

- (d) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (e) mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Government*, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, pengembangan inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survei index kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei index nilai persepsi korupsi
 - (f) mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG kepegawaian, kode etik pegawai, evaluasi jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, kompilasi perjanjian kinerja dan LP2P
 - (g) mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD
 - (h) mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
 - (i) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kependudukan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, penghargaan, pemberian sanksi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (j) mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Badan
 - (k) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Badan
 - (l) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- (3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan

- (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pendaftaran dan penetapan meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak dan dana perimbangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) memfasilitasi UPT-UPT yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai pengenaan pajak daerah yang ada di wilayahnya dan menyampaikan rekapitulasi data wajib pajak daerah kepada bidang pendaftaran dan penetapan badan pendapatan daerah
 - (d) mengkoordinasikan dan memfasilitasi Badan, Dinas/Instansi terkait mengenai data pendapatan minyak bumi, gas, royalti, landren, kehutanan dan perkebunan, perikanan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P3 serta PPh orang pribadi dan Badan
 - (e) mengkoordinasikan dan memfasilitasi perhitungan penetapan pajak daerah serta perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui
 - (f) mengkoordinasikan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan
 - (g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pendaftaran dan penetapan;
 - (h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pendaftaran dan penetapan
 - (i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pendaftaran dan penetapan
 - (j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- (4) Bidang Penagihan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan penagihan meliputi penagihan pajak, keberatan dan restitusi pajak, penagihan non pajak sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - (c) Mengkoordinasikan pelaksanaan permohonan keberatan, restitusi, dan penghapusan pajak dan pemeriksaan, penyitaan aset Wajib Pajak
 - (d) mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, inventarisasi dan identifikasi data penunggak pajak dan non pajak
 - (e) mengkoordinasikan bahan pembuatan surat permintaan transfer

- (f) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan penagihan
 - (g) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan penagihan
 - (h) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penagihan
 - (i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan pembukuan dan pelaporan meliputi pembukuan pendapatan daerah, pembukuan dan verifikasi benda/surat berharga, dan pelaporan pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dan rencana kerja tahunan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
 - (d) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pembukuan dan Pelaporan
 - (e) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan pembukuan dan pelaporan
 - (f) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan pembukuan dan pelaporan
 - (g) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
- (6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, mempunyai tugas:
- (a) Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - (b) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan meliputi perencanaan pendapatan, pengembangan sumber pendapatan, dan pengawasan penatausahaan pendapatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - (c) mengkoordinasikan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
 - (d) mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi laporan pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah

- (e) mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran kebijakan operasional dan strategis perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
- (f) mengkoordinasi, dan memfasilitasi data perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
- (g) mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan
- (h) mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan pendapatan
- (i) mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan perencanaan, pengembangan dan pengawasan penatausahaan pendapatan
- (j) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

2.1.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat, membawahkan:
 - (a) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - (b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - (c) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - (b) Sub Bidang Penetapan Pajak; dan
 - (c) Sub Bidang Dana Perimbangan;
- (4) Bidang Penagihan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Penagihan Pajak;
 - (b) Sub Bidang Keberatan Dan Restitusi Pajak; dan
 - (c) Sub Bidang Penagihan Non Pajak;
- (5) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;
 - (b) Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi Benda/Surat Berharga; dan
 - (c) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
- (6) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengawasan Pendapatan, membawahkan:
 - (a) Sub Bidang Pengawasan Penatausahaan Pendapatan;
 - (b) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan; dan
 - (c) Sub Bidang Pengembangan Sumber Pendapatan;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

(8) Unit Pelaksana Teknis Badan.

2.2. Sumber Daya (**belum disesuaikan**)

Dalam menjalankan tugas pokoknya, sebelum berganti nomenklatur menjadi Badan Pendapatan Daerah (masih Dinas Pendapatan Daerah), jumlah total pegawai sebanyak 423 pegawai (256 pria dan 167 wanita). Jika dilihat berdasarkan golongan, terbanyak adalah Golongan II, yaitu 274 Pegawai, selanjutnya golongan III sebanyak 122 pegawai, Golongan I sebanyak 21 Pegawai, dan Golongan IV sebanyak 6 Pegawai. Dari jumlah yang ada tersebut, pejabat struktural sebanyak 32 pegawai dan non struktural sebanyak 391 pegawai. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Gender		
	Pria	Wanita	Jumlah
I	14	7	21
II	172	102	274
III	65	57	122
IV	5	1	6
Jumlah	256	167	423

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon	Gender		
	Pria	Wanita	Jumlah
I	0	0	
II	1	0	1
III	5	0	5
IV	18	8	26
V	0	0	
Eselon	24	8	32
Non Eselon	232	159	391
Jumlah	256	167	423

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (sebelum menjadi Badan Pendapatan Daerah)

Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak 60,33 persen berpendidikan SLTA, selanjutnya berpendidikan S1 sebanyak 25,89 persen, dan berpendidikan S-2 sebanyak 5,94 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan	Gender		
	Pria	Wanita	Jumlah
S3	1	0	1
S2	13	10	23
S1	46	43	89
D3	4	6	10
D2	0	1	1
SLTA	178	100	278

Pendidikan	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
SLTP	10	5	15
SD	4	2	6
Jumlah	256	167	423

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (sebelum menjadi Badan Pendapatan Daerah)

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Badan Pendapatan daerah secara umum dapat dikatakan baik. Pada tahun 2017 telah mampu meningkatkan PAD secara signifikan yaitu sebesar Rp.282.803.976.194, sedangkan tahun sebelumnya hanya sebesar Rp.249.890.076.798. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 8,70% pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016 hanya sebesar 6,08%. Peningkatan PAD tersebut dikarenakan optimalnya penerimaan Pajak Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan. Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kenaikan mencapai Rp.43.122.726.844, disusul Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp.10.854.839.753.

Capaian indikator, baik Indikator pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD dan indikator pertumbuhan pajak daerah memiliki capaian “sangat tinggi” karena sudah melampaui dari target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, yang menjadi catatan adalah masih rendahnya capaian indikator pertumbuhan Retribusi Daerah. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO) secara signifikan

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Kemandirian (%)	4,9	5,93	6			6,76	5,66	7,55			137,96	95,45	125,83		
2	Rasio Efektivitas (%)	100	100	100			127,2	106,5	94,55			127,24	106,49	94,55		
	Pertumbuhan Kontribusi PAD Terhadap APBD (%)				5,49	6,65				6,08	8,70				110,75	130,83
3	Persentase Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan (%):															
4	a) Persentase Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	103	103	103	-30,44	12,44	98,95	-23,94	14,73	-20,96	85,35	96,07	-23,24	14,30	68,86	686,09
5	b) Persentase Rata-rata Pertumbuhan Retribusi (%)	4,3	5	5	34,18	23,21	-27,08	73,3	-46,2	64,16	-37,90	-629,77	1466,00	-924,20	187,71	-163,29
6	c) Persentase Rata-rata Pertumbuhan Bagi Hasil (%)	10	10	10			8,24	-7,34	7,85			82,40	-73,40	78,50		
7	Jumlah aplikasi Teknologi Informasi layanan SKPD (buah)	3	3	3			3	3	3			100,00	100,00	100,00		
8	Cakupan ketersediaan Standar Pelayanan Publik /SPP (%)	100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00		
9	Cakupan ketersediaan <i>Standard Operating Procedure/SOP</i> (%)	10	50	100			20,54	20,54	20,54			205,40	41,08	20,54		
10	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan (%)	100	100	100			100	100	100			100,00	100,00	100,00		
11	Sumber daya aparatur yang mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi (%)	85	90	100			78,83	97,51	97,51			92,74	108,34	97,51		
12	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi (%)	85	95	100			76,26	80,76	86,64			89,72	85,01	86,64		

Keterangan: Tahun 2013-2015 merupakan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Sebelum mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pendapatan Daerah)

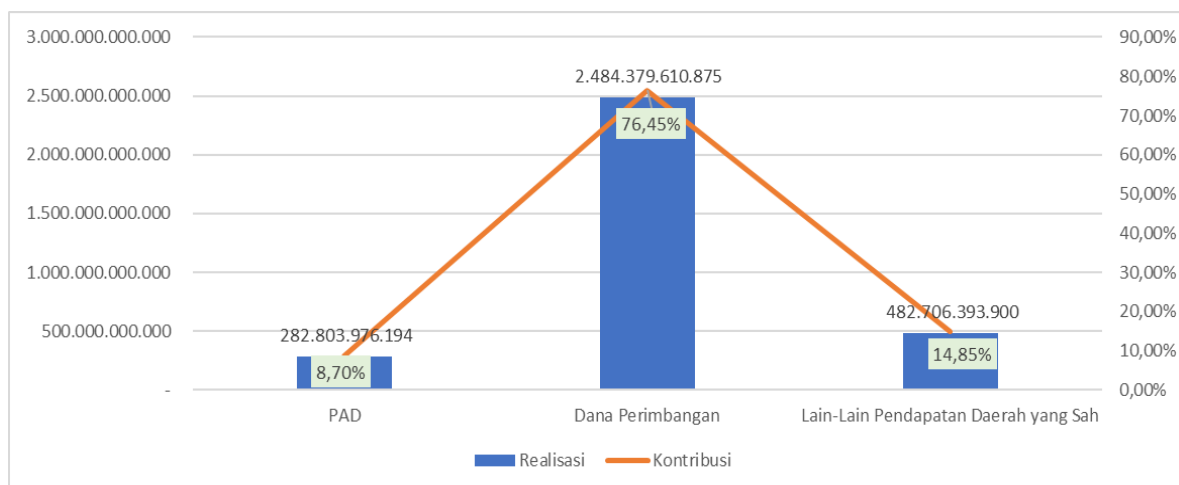
Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

(1) Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap APBD

Jumlah realisasi PAD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017 sebesar Rp282.803.976.194, dan total pendapatan daerah sebesar Rp3.249.889.980.969. Dari data tersebut, **Pertumbuhan Kontribusi PAD Terhadap APBD pada tahun 2017 sebesar 8,70%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 6,65%**. Artinya capaian kinerja pada tahun 2017 **lebih tinggi** dari target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 130,83%. Capaian tersebut jika merujuk pada kriteria penilaian kinerja dari Permendagri 86 Tahun 2017 sudah **sangat tinggi**, karena sudah berada diatas 91%.

Namun demikian, angka ini perlu terus ditingkatkan karena menurut Munir dkk (2004), capaian sebesar 8,70% masih menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang sangat kurang, karena berada pada rentang nilai 0-10%. Rendahnya perolehan persentase tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri, dengan kata lain masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melakukan upaya akseleratif guna meningkatkan PAD ditahun-tahun mendatang.

Jika dilihat dari struktur pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017, sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan (76,45%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 14,85%, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 8,70%. Tingginya Dana Perimbangan tersebut dipengaruhi oleh sumber daya alam (sektor pertambangan), terutama Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan, Perkebunan & Perhutanan sebesar Rp1.012.833.940.719,00, dan Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi & Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp582.150.524.850,00



Gambar 2.1

Realisasi dan Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Tahun 2017

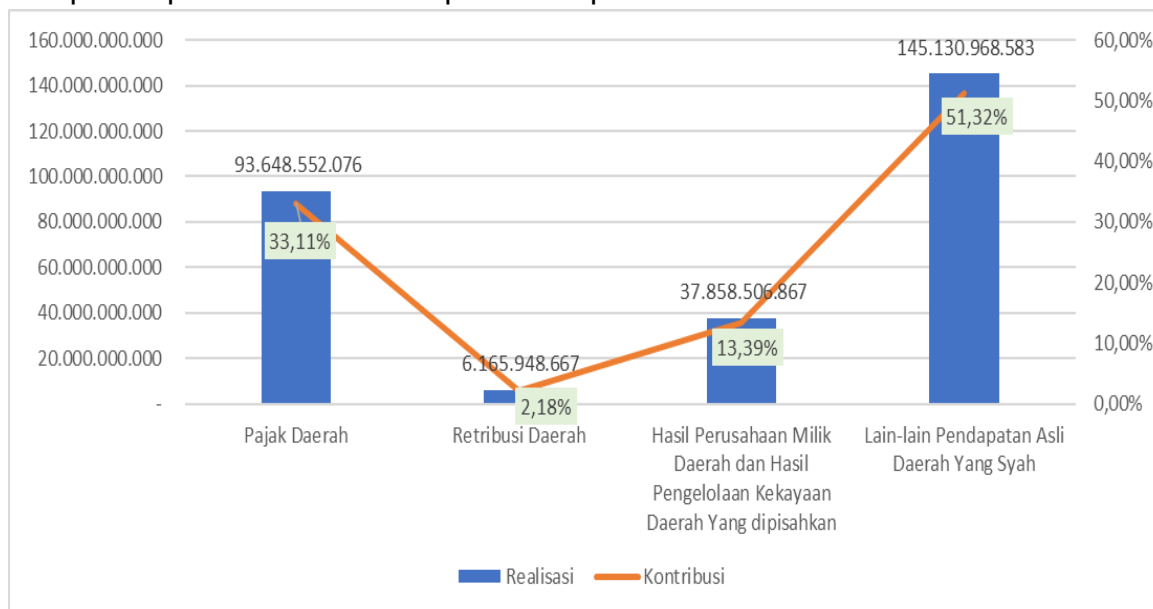
Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Tahun 2017, Diolah

Penerimaan Dana Perimbangan saat ini dan beberapa tahun kedepan mengalami tantangan yang cukup berat mengingat lesunya sektor pertambangan, dan sektor pertambangan merupakan penopang utama perekonomian di Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini dampaknya sudah mulai kentara dengan menurunnya penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2017 hanya sebesar Rp1.975.800.914.554,00, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.3.100.024.932.002, dan Rp.3.959.745.506.629 pada tahun 2015

Berkaca dari kondisi diatas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah saatnya tidak sepenuhnya mengandalkan dari penerimaan Dana Perimbangan, terutama dari bagi hasil sektor pertambangan, mengingat sektor ini mengalami kelesuan dan diperkirakan akan mengalami penurunan. Untuk itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dalam meningkatkan indikator pertumbuhan kontribusi PAD terhadap APBD, dengan terus mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber PAD.

Jika dilihat komponen pembentuk PAD, **kontribusi terbesar adalah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah sebesar 51,32%**, Pajak Daerah sebesar 33,11%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 13,39%, dan Retribusi Daerah sebesar 2,18%.

Adapun realisasi dan kontribusi terhadap PAD pada masing-masing komponen pembentuk PAD dapat dilihat pada Gambar 3.3. berikut ini.



Gambar 2.2.
Realisasi dan Kontribusi Komponen Pembentuk PAD Terhadap Total PAD Tahun 2017

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Tahun 2017, Diolah

Dari rincian masing-masing komponen PAD, penerimaan dari pajak daerah terbesar adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak

Restoran masing-masing sebesar Rp45.617.816.017 dan Rp22.079.659.002. Selanjutnya penerimaan Retribusi Daerah, terbesar adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masing-masing sebesar Rp2.350.165.000 dan Rp989.779.220. Capaian realisasi Retribusi tersebut sangat menarik untuk dicermati, pada tahun 2016 retribusi IMB adalah komponen yang menyumbang retribusi daerah paling tinggi diikuti dengan retribusi tempat rekreasi. Namun pada tahun ini, posisi kedua komponen tersebut berbanding terbalik dengan tahun lalu. Kemudian pada tahun 2015 bahwa Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO) merupakan nomor 2 (dua) tertinggi setelah Retribusi Izin IMB, dan pada tahun 2017 posisi tersebut tergantikan dengan capaian Retribusi Tempat Rekreasi sedangkan retribusi HO menempati urutan yang ketiga terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya akseleratif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan penerimaan PAD dari sumber Retribusi Daerah, dengan tidak hanya bergantung pada Retribusi IMB dan Retribusi HO saja namun terus mengoptimalkan potensi lainnya, seperti dari Retribusi Tempat Rekreasi.

Kemudian pada Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, sebesar Rp37.858.506.867 dari Bank Pembangunan Daerah (Bank Kaltim). Komponen pembentuk PAD selanjutnya adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terbesar adalah pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.A.M Parikesit sebesar Rp55.822.692.630 dan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja sebesar Rp39.434.145.161.

Adapun rincian realisasi komponen pembentuk PAD tahun 2017 selengkapanya dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini.

Tabel 2.4.
Rincian Realisasi Komponen Pembentuk PAD Tahun 2017

No	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kontribusi terhadap Total PAD
I	PAJAK DAERAH				
	Pajak Hotel	3.000.000.000	1.413.685.916	47,12%	0,50%
	Pajak Restoran	26.300.000.000	22.079.659.002	83,95%	7,81%
	Pajak Hiburan	351.000.000	308.450.484	87,88%	0,11%
	Pajak Reklame	1.350.000.000	1.078.126.826	79,86%	0,38%
	Pajak Penerangan Jalan	18.151.000.000	19.240.188.702	106,00%	6,80%
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400.000.000	123.032.645	30,76%	0,04%
	Pajak Parkir	250.000.000	319.086.350	127,63%	0,11%
	Pajak Air Tanah	800.000.000	421.891.255	52,74%	0,15%
	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000	1.760.250	2,93%	0,00%
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.000.000.000	3.044.854.630	101,50%	1,08%
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	45.000.000.000	45.617.816.017	101,37%	16,13%
	TOTAL PAJAK DAERAH	98.662.000.000	93.648.552.076	94,92%	33,11%
II	RETRIBUSI DAERAH				
	Retribusi Jasa Umum				
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
	Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan	360.000.000	272.000	0,08%	0,00%
	Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus	20.000.000	3.375.000	16,88%	0,00%
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	38.750.000	-	-	-
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	-	-
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	384.010.000	198.965.000	51,81%	0,07%
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.066.905.000	596.827.405	55,94%	0,21%

No	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kontribusi terhadap Total PAD
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	732.046.709	639.762.000	87,39%	0,23%
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	26.000.000	21.000.000	80,77%	0,01%
	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-
	Retribusi Pengendalian Menara komunikasi	-	-	-	-
	Retribusi Jasa Usaha				
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	129.860.000	29.750.000	22,91%	0,01%
	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	-	-	#DIV/0!	-
	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	-	-	-	-
	Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-
	Retribusi Terminal	4.000.000	8.350.000	208,75%	0,00%
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000	-	-	-
	Retribusi Tempat Penginapan/Persangrahaan/Villa	-	-	-	-
	Retribusi Rumah Potong Hewan	253.500.000	133.800.000	52,78%	0,05%
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	85.000.000	72.570.000	85,38%	0,03%
	Retribusi Tempat Rekreasi	2.700.000.000	2.350.165.000	87,04%	0,83%
	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	170.000.000	184.401.000	108,47%	0,07%
	Retribusi Perizinan Tertentu				
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	5.077.512.880	989.779.220	19,49%	0,35%
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	-
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	1.468.002.038	839.315.642	57,17%	0,30%
	Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-
	Retribusi Perpanjangan IMTA	150.000.000	97.616.400	65,08%	0,03%
	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	12.715.586.627	6.165.948.667	48,49%	2,18%
III	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN				
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD				
	Perusda Air Minum (PDAM)	-	-	-	-
	Perusda Kelistrikan	-	-	-	-
	Bank Pembangunan Daerah (Bank Kaltim)	37.858.506.867	37.858.506.867	100,00%	13,39%
	Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kab.Kukar	-	-	-	-
	Bag.Laba atas Penyert.Modal pd Perh.Milik Pemerintah/BUMN	-	-	-	-
	Bag.Laba atas Penyert.Modal pd Perh.Milik Swasta	500.000.000	-	-	-
	TOTAL HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	38.358.506.867	37.858.506.867	98,70%	13,39%
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH				
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	84.000.000	7.880.000	9,38%	0,00%
	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000	4.809.333	0,10%	0,00%
	Pendapatan Bunga Deposito	-	-	-	-
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-
	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	-	-	-
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
	Pendapatan Denda Pajak	-	236.246.952	-	0,08%
	Pendapatan Denda Retribusi	-	655.018.000	-	0,23%
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-
	Pendapatan Dari Pengembalian	-	-	-	-
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
	Angsuran / Cicilan Penjualan Rumah Dinas	-	-	-	-
	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Rumah	14.332.500	-	-	-
	Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	200.000.000	-	-	-
	Angsuran / Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	-	-	-	-
	Sewa Rumah	200.000.000	135.264.157	67,63%	0,05%
	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tempat Olahraga	164.000.000	5.504.000	3,36%	0,00%
	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	150.000.000	310.179.400	206,79%	0,11%
	Sewa (ATM, Gedung PKM dll)	175.000.000	87.950.000	50,26%	0,03%
	Sewa Lapak Pedagang Dipulau Kumala	100.000.000	-	-	-
	Pendapatan Zakat	-	-	-	-
	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.A.M Parikesit	115.000.000.000	55.822.692.630	48,54%	19,74%
	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	31.616.874.702	39.434.145.161	124,72%	13,94%
	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	1.500.000.000	-	-	-

No	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kontribusi terhadap Total PAD
	RSUD.Dayaku Raja Kota Bangun				
	Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	
	Penerimaan Lain-lain	30.000.000.000	30.900.361.383	103,00%	10,93%
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	19.467.567.890	12.199.278.661	62,66%	4,31%
	Pendapatan Non Dana Kapitasi JKN	387.509.565	-	-	
	Tarif Pelayanan Kesehatan	3.524.142.358	3.891.336.742	110,42%	1,38%
	Penerimaan Dari PT.Taspen	2.000.000.000	1.440.302.164	72,02%	0,51%
	BOSNAS	94.092.400.000	-	-	
	TOTAL LAIN-LAIN PAD YANG SAH	303.661.494.515	145.130.968.583	47,79%	51,32%
	TOTAL PAD	453.397.588.010	282.803.976.194	62,37%	100,00%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Tahun 2017, Diolah

Capaian Indikator Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap APBD (%) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 terbilang **cukup menggembirakan**, yaitu dengan **capaian kinerja sebesar 143,09%** atau masuk pada kategori **sangat Tinggi**. Realisasi pada tahun tahun 2017 sebesar 8,70%, sedangkan tahun 2016 sebesar 6,08%, pada tahun 2015 sebesar 7,55%, kemudian ditahun 2014 hanya 5,66%, dan tahun 2013 sebesar 6,76%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2.5.
Pertumbuhan Kontribusi PAD Tahun 2013-2017

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013
1	Jumlah PAD	282.803.976.194	249.890.076.798	385.558.046.639	367.393.986.258	404.024.245.373
2	Total Pendapatan Daerah	3.249.889.980.969	4.113.175.020.919	5.104.475.173.618	6.487.598.790.296	5.974.962.493.470
	Kontribusi PAD	8,70%	6,08%	7,55%	5,66%	6,76%

Terlihat pada tabel diatas bahwa capaian kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah pada tahun 2017 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun total pendapatan daerah pada periode tersebut lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Jika dilihat dari komponen pembentuk PAD, Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kenaikan mencapai Rp.43.122.726.844, disusul Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp.10.854.839.753. Sedangkan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp. -3.763.046.743, dan -17.300.620.459. Hal ini patut diapresiasi mengingat pada tahun sebelumnya (2016) hampir semua komponen PAD mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6.
Realisasi PAD Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya

No	Komponen PAD	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Selisih 2017 Vs 2016
1	Pajak Daerah	93.648.552.076	50.525.825.232	63.925.461.374	55.719.255.026	73.258.220.525	36.821.737.919	43.122.726.844
2	Retribusi Daerah	6.165.948.667	9.928.995.410	6.048.180.562	11.243.562.004	6.487.735.865	8.897.450.697	-3.763.046.743
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	37.858.506.867	27.003.667.114	41.892.654.522	55.850.761.695	37.368.612.135	21.416.855.887	10.854.839.753
4	Lain-lain PAD Yang Sah	145.130.968.583	162.431.589.042	273.691.750.181	244.580.407.533	286.909.676.849	213.489.446.277	-17.300.620.459
	Jumlah	282.803.976.194	249.890.076.798	385.558.046.639	367.393.986.258	404.024.245.374	280.625.490.780	32.913.899.396

Meningkatnya penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh kenaikan sebagian besar komponen, antara lain:

- (1) Pajak Restoran
- (2) Pajak Hiburan
- (3) Pajak Reklame
- (4) Pajak Penerangan Jalan
- (5) Pajak Parkir
- (6) Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Tabel 2.7.
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya

No	Komponen Pajak Daerah	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Selisih 2017 Vs 2016
1	Pajak Hotel	1.413.685.916	1.733.930.258	2.568.356.782	2.836.072.182,00	1.837.154.114	1.406.094.267	-320.244.342
2	Pajak Restoran	22.079.659.002	21.811.003.510	29.035.072.213	25.982.401.811,00	21.062.769.856	14.609.704.915	268.655.492
3	Pajak Hiburan	308.450.484	238.646.665	98.675.728	228.927.703,00	263.518.139	288.739.765	69.803.819
4	Pajak Reklame	1.078.126.826	903.005.931	1.385.560.650	1.531.811.150,00	981.232.425	1.170.940.625	175.120.895
5	Pajak Penerangan Jalan	19.240.188.702	13.001.859.220	20.661.837.827	12.012.152.851,00	8.207.617.613	8.036.934.412	6.238.329.482
6	Pajak Parkir	319.086.350	218.204.450	48.473.600	-	-	-	100.881.900
7	Pajak Air Tanah	421.891.255	807.318.209	806.347.061	464.838.550,00	359.072.099	234.535.260	-385.426.954
8	Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet	1.760.250	750.000	-	3.198.000,00	17.550.000	43.875.000	1.010.250
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.032.645	129.963.518	497.814.912	514.776.915,00	105.913.982	276.442.362	-6.930.873
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.044.854.630	3.076.640.900	3.421.258.916	983.125.486,00	-	-	-31.786.270
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	45.617.816.017	8.604.502.571	5.402.063.686	11.161.950.378,05	40.423.392.297	10.754.471.312	37.013.313.446
	Jumlah	77.689.970.726	50.525.825.232	63.925.461.374	55.719.255.026,05	73.258.220.525,00	36.821.737.918,00	27.164.145.494

Kemudian dilihat dari komponen retribusi daerah. Jenis penerimaan ini merupakan salah satu yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2017 dibandingkan dengan jenis penerimaan PAD lainnya. Menurunnya Retribusi Daerah tahun 2017 ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar jenis retribusi secara signifikan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.8.
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Selisih 2017 Vs 2016
1	Retribusi Jasa Umum								-
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	2.257.000	127.930.990	228.920.005,00	129.101.110	449.933.262	480.395.750	-2.257.000
	Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan	272000	150.000.000	307.765.000	405.205.000,00	418.345.000	87.439.500	40.927.500	-149.728.000
	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil			0	1.168.887.500,00	1.539.057.500	689.548.000	1.049.313.500	
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			-	-				
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	198.965.000	359.545.000	324.980.000	146.550.000,00	131.624.500	62.060.000	45.738.000	-160.580.000
	Retribusi Pelayanan Pasar	596.827.405	904.078.626	521.721.002	604.166.538,00	429.548.173	373.250.858	350.017.809	-307.251.221

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	Selisih 2017 Vs 2016
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	639.762.000	818.873.900	757.157.140	443.311.040,00	365.237.680	306.765.960	308.608.600	-179.111.900
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		-	-	-				
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	21.000.000	34.375.000	53.352.970	3.600.000,00				-13.375.000
	Retribusi Pelayanan Pendidikan			-	-				
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair			-	-		8.500.000		
	Retribusi Pengendalian Menara komunikasi			0	18.370.421,00	48.139.203	0		
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang			-	-	-	0		
	Retribusi Penyediaan dan/penyediaan Kakus	3.375.000	14.345.000	18.225.000	48.600.000,00	49.950.000	39.500.000	54.500.000	-10.970.000
2	Retribusi Jasa Usaha								
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	29.750.000	142.181.000	116.731.400	106.055.000,00	96.796.963	229.796.926	375.686.526	-112.431.000
	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan			-	-	-	0		
	Retribusi Tempat Pelelangan			-	-	-	0		
	Retribusi Terminal	8.350.000	6000000	-	-	-	0		2.350.000
	Retribusi Tempat Khusus Parkir			12.380.000	0	-	0	8.400.000	
	Retribusi Tempat Penginapan/			-	-	-	0		
	Persangrahaan/Villa								
	Retribusi Rumah Potong Hewan	133.800.000	139350000	0	233.400.000,00	180.262.500	127.226.750	60.682.500	-5.550.000
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	72.570.000	66070000	268.889.000	138.279.200,00	21.384.500	25.128.000	25.133.400	6.500.000
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.534.566.000	3011767564	179.250.000	574.575.000,00	235.724.000	190.500.000	98.987.000	-477.201.564
	Retribusi Penyeberangan Di Atas Air			663.150.000	0	-	0		
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			-	-	8.338.150	9.000.000	12.000.000	
	Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan			-	-	-	0		
3	Retribusi Perizinan Tertentu								
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	989.779.220	2789310043	1.380.955.100	5.459.398.199,00	1.750.757.488	5.303.705.564	7.025.169.284	-1.799.530.823
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			-	-	-	0	2.800.000	
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	839.315.642	1407454277	1.315.692.960	1.664.244.101,00	1.083.469.098	995.095.877	1.661.913.498	-568.138.635
	Retribusi Izin Trayek			-	-	-	0		
	Retribusi Izin Usaha Perikanan			-	-	-	0		
	Retribusi Perpanjangan IMTA	97.616.400	83388000						14.228.400
	Jumlah	6.165.948.667	9.928.995.410	6.048.180.562	11.243.562.004,00	6.487.735.865	8.897.450.697	11.600.273.367	-3.763.046.743

Komponen PAD berikutnya yang mengalami peningkatan yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Komponen ini pada tahun 2017 hanya terealisasi pada satu jenis penerimaan saja, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp.10.872.316.033. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9. berikut ini:

Tabel 2.9.
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	Selisih Tahun 2017 vs 2016
I	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					
	Perusda Air Minum (PDAM)					
	Perusda Kelistrikan			0	2.013.925.239,70	
	Bank Pembangunan Daerah (Bank Kaltim)	37.858.506.867	26.986.190.834	41.892.654.522	53.553.694.504,01	10.872.316.033
	Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kab.Kukar					
II	Bag.Laba atas Penyert.Modal pd Perh. Milik Pemerintah/BUMN					
	Bag.Laba atas Penyert.Modal pd Perh.Milik Swasta	0	17476280	0	283.141.951,00	-17.476.280
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan)	37.858.506.867	27.003.667.114	41.892.654.522	55.850.761.695	10.854.839.753

Sementara itu, tren yang negatif terjadi pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah. Penerimaan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp145.130.968.583, sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp162.431.589.042, dan tahun 2015 terealisasi sebesar Rp.273.691.750.180,92, dan realisasi tahun 2014 sebesar 244.580.407.533. Artinya pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.-17.300.620.459. Penurunan cukup drastis terdapat pada Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.A.M Parikesit sebesar Rp-24.152.639.583, dan Penerimaan Lain-lain sebesar Rp-12.423.060.913. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya

No	Komponen Lain-Lain PAD yang Sah	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Selisih 2017 Vs 2016
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	7.880.000	7.308.000	47.626.000	36.067.000	880.000.000	18.000.000	572.000
2	Penerimaan Jasa Giro	4.809.333	4.450.336.927	22.164.077.826	6.516.193.156	51.181.859.048	50.433.644.822	-4.445.527.594
3	Pendapatan Bunga Deposito			37.376.712.329	75.609.931.507	97.572.021.743	106.709.223.832	0
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				-			0
5	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah				-			0
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				368.125.211			0
7	Pendapatan Denda Pajak	236.246.952	166.236.433	83.715.986	144.950.821			70.010.519
8	Pendapatan Denda Retribusi	655.018.000	881.325.000	1.101.870.840	-			-226.307.000
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan				-			0
10	Pendapatan Dari Pengembalian			473.222.597	9.879.997.075	108.320.240	5.802.853.088	0
11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				-	14.144.835.764		0
12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				-			0
13	Angsuran / Cicilan Penjualan Rumah Dinas				1.760.000		1.335.250	0
14	Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas			408.478.000	8.896.325	3.980.200		0
15	Angsuran / Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah				-			0
16	Sewa Rumah	135.264.157	58.525.502	146.047.401	76.560.638	203.030.301	214.993.047	76.738.655
	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tempat Olahraga	5.504.000						5.504.000
	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	310.179.400						310.179.400
17	Hasil Pengelolaan Dana dari Kelompok Masyarakat				-			0
18	Penerimaan Lain-lain	30.900.361.383	43.323.422.296	108.427.243.840	68.083.923.528	118.849.446.166	46.819.027.486	-12.423.060.913
19	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.A.M Parikesit	55.822.692.630	79.975.332.213	56.690.221.263	56.847.086.661			-24.152.639.583
20	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	39.434.145.161	32.078.818.547	32.756.910.432	24.977.376.828			7.355.326.614
21	Penerimaan Dari PT. TASPEN	1.440.302.164	1.490.284.124	1.658.294.288	2.029.538.784	3.966.183.387	3.490.368.752	-49.981.960
22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	12.199.278.661		12.258.483.000	-			12.199.278.661
23	Sewa (ATM, Gedung PKM dll)	87.950.000						87.950.000
24	Penerimaan Lain-lain							0
25	Pendapatan Dana Kapitasi JKN							0
26	Tarif Pelayanan Kesehatan	3.891.336.742						3.891.336.742
	Jumlah	145.130.968.583	162.431.589.042	273.691.750.181	244.580.407.533	286.909.676.849	213.489.446.277	-17.300.620.459

Menurunnya beberapa komponen PAD ternyata diikuti oleh Bagian Dana Perimbangan. Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp-1.124.224.017.448. Keadaan ini menjadikan **total Pendapatan Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) dengan selisih kekurangan sebesar Rp-1.040.481.726.151.** Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.11. berikut ini.

Tabel 2.11
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	2017	2016	2015	2014	2013	2012	Selisih 2017 Vs 2016
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH							-
	Pajak Daerah	93.648.552.076	50.525.825.232	63.925.461.374	55.719.255.026	73.258.220.525	36.821.737.919	43.122.726.844
	Retribusi Daerah	6.165.948.667	9.928.995.410	6.048.180.562	11.243.562.004	6.487.735.865	8.897.450.697	-3.763.046.743
	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	37.858.506.867	27.003.667.114	41.892.654.522	55.850.761.695	37.368.612.135	21.416.855.887	10.854.839.753
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah	145.130.968.583	162.431.589.042	273.691.750.180,92	244.580.407.533	286.909.676.849	213.489.446.277	-17.300.620.459
	Jumlah PAD	282.803.976.194	249.890.076.798	385.558.046.639,20	367.393.986.258	404.024.245.374	280.625.490.780	32.913.899.396
2	BAGIAN DANA PERIMBANGAN							0
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak							0
	Bagi Hasil Pajak	1.089.543.493.586,00	1.129.742.740.295	1.140.620.409.112	897.660.628.477	876.403.171.861	553.462.193.310	-40.199.246.709
	Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	886.257.420.968,00	1.970.282.191.707	2.819.125.097.517	4.174.480.891.711	3.756.689.352.136	4.544.514.674.586	-1.084.024.770.739
	Jumlah	1.975.800.914.554,00	3.100.024.932.002	3.959.745.506.629	5.072.141.520.188	4.633.092.523.997	5.097.976.867.896	-1.124.224.017.448
	Dana Alokasi Umum							0
	Dana Alokasi Umum							0
	Jumlah							0
	Dana Alokasi Khusus							0
	Dana Alokasi Khusus							0
	Jumlah							0
	Jumlah Dana Perimbangan	1.975.800.914.554,00	3.100.024.932.002	3.959.745.506.629	5.072.141.520.188	4.633.092.523.997	5.097.976.867.896	-1.124.224.017.448
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH							0
	Pendapatan Hibah							0
	Jumlah							0
	Dana Darurat							0
	Penanggulangan Korban / Kerusakan Akibat Bencana Alam							0
	Jumlah							0
	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya							0
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	294.347.784.000,00	218.705.776.000	341.522.579.350	395.121.551.850	417.762.476.100	353.261.323.000	75.642.008.000
	Jumlah	294.347.784.000,00	218.705.776.000	341.522.579.350	395.121.551.850	417.762.476.100	353.261.323.000	75.642.008.000
	Dana Penyesuaian							0
	Dana Penyesuaian	161.651.629.900,00	117.458.734.749	328.981.341.000	164.600.227.000	174.493.912.000	136.737.704.000	44.192.895.151
	Jumlah	161.651.629.900,00	117.458.734.749	328.981.341.000	164.600.227.000	174.493.912.000	136.737.704.000	44.192.895.151
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya							0
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau pemerintah lainnya	26.706.980.000,00	95.713.491.250	88.667.700.000	307.059.700.000	155.167.938.000	185.108.129.000	-69.006.511.250
	Jumlah	26.706.980.000,00	95.713.491.250	88.667.700.000	307.059.700.000	155.167.938.000	185.108.129.000	-69.006.511.250
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	482.706.393.900,00	431.878.001.999	759.171.620.350	866.781.478.850	747.424.326.100	675.107.156.000	50.828.391.901
	JUMLAH PENDAPATAN	2.741.311.284.647,58	3.781.793.010.799	5.104.475.173.618	6.306.316.985.296	5.784.541.095.471	6.053.709.514.676	-1.040.481.726.151

Keterangan:

Tidak termasuk DAU dan DAK

(2) Pertumbuhan Pajak Daerah

Jumlah realisasi pajak daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017 sebesar Rp93.648.552.076, sedangkan realisasi tahun sebelumnya (2016) sebesar Rp50.525.825.232. Jika menggunakan formula perhitungan pertumbuhan, maka hasilnya **mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 85,35%**. Artinya realisasi tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, dan capaian ini jauh di atas target yang ditetapkan (12,89%) (**Sangat Tinggi**). Adapun pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah di Kutai Kartanegara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12.
Pertumbuhan Masing-Masing Jenis Pajak Daerah

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Pertumbuhan (%)
1	Pajak Hotel	1.733.930.258,00	1.413.685.916	-18,47%
2	Pajak Restoran	21.811.003.510,00	22.079.659.002	1,23%
3	Pajak Hiburan	238.646.665,00	308.450.484	29,25%
4	Pajak Reklame	903.005.931,00	1.078.126.826	19,39%
5	Pajak Penerangan Jalan	13.001.859.220,00	19.240.188.702	47,98%
6	Pajak Parkir	218.204.450,00	319.086.350	46,23%
7	Pajak Air Tanah	807.318.209,00	421.891.255	-47,74%
8	Pajak Pengambilan	750.000,00	1.760.250	134,70%

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Pertumbuhan (%)
	Sarang Burung Walet			
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	129.963.518,00	123.032.645	-5,33%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.076.640.900,00	3.044.854.630	-1,03%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	8.604.502.571,00	45.617.816.017	430,16%
Jumlah Pajak Daerah		50.525.825.232	93.648.552.076	85,35%

Berdasarkan Tabel 2.12. diatas menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) Pajak Daerah, sebanyak 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah yang mengalami pertumbuhan positif, sedangkan sisanya **(4 Pajak Daerah) yang mengalami kontraksi**. Jenis Pajak Daerah yang mengalami pertumbuhan positif, tertinggi berturut-turut adalah:

- 1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
- 2) Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet
- 3) Pajak Penerangan Jalan
- 4) Pajak Parkir
- 5) Pajak Hiburan
- 6) Pajak Reklame
- 7) Pajak Restoran

Sedangkan jenis Pajak Daerah yang mengalami kontraksi yaitu:

- 1) Pajak Air Tanah
- 2) Pajak Hotel
- 3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Capaian indikator ini pada tahun 2017 sebesar 85,36%, sedangkan capaian pada tahun sebelumnya (2016) sebesar -20,96%, atau **capaian kinerjanya 407,17%**. Angka ini masuk pada kategori **Sangat Tinggi**.

Tabel 2.13.
Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2017 Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun Sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2017 vs Tahun 2016	Kategori
			2016	2015	2014	2013		
Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya	50.525.825.232	63.925.461.374	55.719.255.026	73.258.220.525	36.821.737.919	-407,19%	Sangat Tinggi
	Jumlah Realisasi Pajak Tahun Sekarang	93.648.552.076	50.525.825.232	63.925.461.374	55.719.255.026	73.258.220.525		
	Hasil	85,35%	-20,96%	14,73%	-23,94%	98,95%		

Adapun pertumbuhan rincian (komponen) pajak daerah beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14
Pertumbuhan Komponen Pajak Daerah
Tahun 2017 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Komponen Pajak Daerah	2017		2016		2015		2014		2013
		Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi
1	Pajak Hotel	1.413.685.916	-18,47%	1.733.930.258	-32,49%	2.568.356.782	-9,44%	2.836.072.182,00	54,37%	1.837.154.114
2	Pajak Restoran	22.079.659.002	1,23%	21.811.003.510	-24,88%	29.035.072.213	11,75%	25.982.401.811,00	23,36%	21.062.769.856
3	Pajak Hiburan	308.450.484	29,25%	238.646.665	141,85%	98.675.728	-56,90%	228.927.703,00	-13,13%	263.518.139
4	Pajak Reklame	1.078.126.826	19,39%	903.005.931	-34,83%	1.385.560.650	-9,55%	1.531.811.150,00	56,11%	981.232.425
5	Pajak Penerangan Jalan	19.240.188.702	47,98%	13.001.859.220	-37,07%	20.661.837.827	72,01%	12.012.152.851,00	46,35%	8.207.617.613
6	Pajak Parkir	319.086.350	46,23%	218.204.450	350,15%	48.473.600				
7	Pajak Air Tanah	421.891.255	-47,74%	807.318.209	0,12%	806.347.061	73,47%	464.838.550,00	29,46%	359.072.099
8	Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet	1.760.250	134,70%	750.000		-	-100,00%	3.198.000,00	-81,78%	17.550.000
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	123.032.645	-5,33%	129.963.518	-73,89%	497.814.912	-3,30%	514.776.915,00	386,03%	105.913.982
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.044.854.630	-1,03%	3.076.640.900	-10,07%	3.421.258.916	248,00%	983.125.486,00		
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	45.617.816.017	430,16%	8.604.502.571	59,28%	5.402.063.686	-51,60%	11.161.950.378,05	-72,39%	40.423.392.297
	Jumlah	93.648.552.076	85,35%	50.525.825.232	-20,96%	63.925.461.374	14,73%	55.719.255.026,05	-23,94%	73.258.220.525,00

(3) Pertumbuhan Retribusi Daerah

Jumlah realisasi retribusi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2017 sebesar Rp.6.165.948.667, sedangkan realisasi tahun sebelumnya (2016) sebesar Rp.9.928.995.410.- Menggunakan formula perhitungan pertumbuhan diatas, **hasilnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -37,90%**. Angka ini **jauh dibawah target yang yang ditetapkan (7,97%)**, atau dengan tingkat capaian -475,53% (**Sangat Rendah**). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.15. berikut ini.

Tabel 2.15.
Pertumbuhan Masing-Masing Jenis Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Pertumbuhan (%)
A	Retribusi Jasa Umum	2.269.129.526	1.460.201.405	-35,65%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.257.000,00	0	-100,00%
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	150.000.000,00	272000	-99,82%
3	Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus	14.345.000	3.375.000	-76,47%
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat			
5	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	359.545.000,00	198.965.000	-44,66%
6	Retribusi Pelayanan Pasar	904.078.626,00	596.827.405	-33,99%
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	818.873.900,00	639.762.000	-21,87%
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran			
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	34.375.000,00	21.000.000	-38,91%

No	Jenis Retribusi	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Pertumbuhan (%)
10	Retrebusi Pelayanan Pendidikan			
11	Retribusi Pengendalian Menara komunikasi			
12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang			
B	Retribusi Jasa Usaha	3.379.713.564	2.779.036.000	-17,77%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	142.181.000,00	29.750.000	-79,08%
2	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan			
3	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan			
4	Retribusi Tempat Pelelangan			
5	Retribusi Terminal	6.000.000,00	8.350.000	39,17%
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir			
7	Retribusi Tempat Penginapan/Persanggrahaan/ Villa			
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	139.350.000,00	133.800.000	-3,98%
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	66.070.000,00	72.570.000	9,84%
10	Retribusi Tempat Rekreasi	3.011.767.564	2.350.165.000	-21,97%
11	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	0	184.401.000	
C	Retribusi Perizinan Tertentu	4.280.152.320	1.926.711.262	-54,98%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.789.310.043	989.779.220	-64,52%
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			
3	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	1.407.454.277	839.315.642	-40,37%
4	Retribusi Izin Trayek			
5	Retribusi Izin Usaha Perikanan			
6	Retribusi Perpanjangan IMTA	83.388.000,00	97.616.400	17,06%
Jumlah Retribusi Daerah		9.928.995.410	6.165.948.667	-37,90%

*) Pada tahun 2016, retribusi pelayanan tempat olahraga masih menjadi satu dengan retribusi tempat rekreasi

Berdasarkan Tabel 2.15. diatas, menunjukkan bahwa sebagian besar komponen retribusi pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan dengan tahun lalu (2016).

Capaian indikator ini pada tahun 2017 sebesar -37,90%, sedangkan capaian pada tahun sebelumnya (2016) sebesar 64,16%, atau **capaian mencapai -59,07%**. Angka ini masuk pada kategori **Sangat Rendah**.

Tabel 2.16.
Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2017
Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Perhitungan	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun Sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2017 vs Tahun 2016	Kategori
			2016	2015	2014	2013		
Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)	Jumlah Realisasi Retribusi Tahun Sebelumnya	9.928.995.410	6.048.180.562	11.243.562.004	6.487.735.865	8.897.450.697	-59,07%	Sangat Rendah
	Jumlah Realisasi Retribusi Tahun Sekarang	6.165.948.667	9.928.995.410	6.048.180.562	11.243.562.004	6.487.735.865		
	Hasil	-37,90%	64,16%	-46,21%	73,30%	-27,08%		

Adapun pertumbuhan rincian (komponen) Retribusi Daerah beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.17. berikut ini:

Tabel 2.17.
Pertumbuhan Komponen Retribusi Daerah
Tahun 2017 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Uraian	2017		2016		Tahun 2015		Tahun 2014		Tahun 2013		Tahun 2012		Tahun 2011
		Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum													
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	-100,00%	2.257.000	-98,24%	127.930.990	-44,12%	228.920.005,00	77,32%	129.101.110	-71,31%	449.933.262	-6,34%	480.395.750
	Retribusi Pelayanan Kebersihan / Persampahan	272000	0,998187	150.000.000	-51,26%	307.765.000	-24,05%	405.205.000,00	-3,14%	418.345.000	378,44%	87.439.500	113,64%	40.927.500
	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil							1.168.887.500,00	-24,05%	1.539.057.500	123,20%	689.548.000	-34,29%	1.049.313.500
	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat													
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	198.965.000	-44,66%	359.545.000	10,64%	324.980.000	121,75%	146.550.000,00	11,34%	131.624.500	112,09%	62.060.000	35,69%	45.738.000
	Retribusi Pelayanan Pasar	596.827.405	-33,99%	904.078.626	73,29%	521.721.002	-13,65%	604.166.538,00	40,65%	429.548.173	15,08%	373.250.858	6,64%	350.017.809
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	639.762.000	-21,87%	818.873.900	8,15%	757.157.140	70,80%	443.311.040,00	21,38%	365.237.680	19,06%	306.765.960	-0,60%	308.608.600
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran													
	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	21.000.000	-38,91%	34.375.000	-35,57%	53.352.970	1382,03%	3.600.000,00						
	Retribusi Pelayanan Pendidikan													
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair										100,00%	8.500.000		
	Retribusi Pengendalian Menara komunikasi							18.370.421,00	-61,84%	48.139.203				
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang													
	Retribusi Penyediaan dan/Pyenyedotan Kakus	3.375.000	-76,47%	14.345.000	-21,29%	18.225.000	-62,50%	48.600.000,00	-2,70%	49.950.000	26,46%	39.500.000	-27,52%	54.500.000
2	Retribusi Jasa Usaha													
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	29.750.000	-79,08%	142.181.000	21,80%	116.731.400	10,07%	106.055.000,00	9,56%	96.796.963	-57,88%	229.796.926	-38,83%	375.686.526
	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan													
	Retribusi Tempat Pelelangan													
	Retribusi Terminal	8.350.000	39,17%	6.000.000										
	Retribusi Tempat Khusus Parkir					12.380.000							-100,00%	8.400.000
	Retribusi Tempat Penginapan/ Persanggrahaan/Villa													
	Retribusi Rumah Potong Hewan	133.800.000	-3,98%	139.350.000				233.400.000,00	29,48%	180.262.500	41,69%	127.226.750	109,66%	60.682.500
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	72.570.000	9,84%	66.070.000	-75,43%	268.889.000	94,45%	138.279.200,00	546,63%	21.384.500	-14,90%	25.128.000	-0,02%	25.133.400
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.534.566.000	-15,84%	3.011.767.564	1580,21%	179.250.000	-68,80%	574.575.000,00	143,75%	235.724.000	23,74%	190.500.000	92,45%	98.987.000
	Retribusi penyeberangan Di Atas Air					663.150.000								
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah								100,00%	8.338.150	-7,35%	9.000.000	-25,00%	12.000.000
	Penjualan Produksi Usaha Daerah													

No	Uraian	2017		2016		Tahun 2015		Tahun 2014		Tahun 2013		Tahun 2012		Tahun 2011
		Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi	Δ	Realisasi
	Bidang Perikanan dan Kelautan													
	Retribusi Perizinan Tertentu													
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	989.779.220	-64,52%	2.789.310.043	101,98%	1.380.955.100	-74,70%	5.459.398.199,00	211,83%	1.750.757.488	-66,99%	5.303.705.564	-24,50%	7.025.169.284
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol											0	-	2.800.000
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	839.315.642	-40,37%	1.407.454.277	6,97%	1.315.692.960	-20,94%	1.664.244.101,00	53,60%	1.083.469.098	8,88%	995.095.877	-40,12%	1.661.913.498
	Retribusi Izin Trayek													
	Retribusi Izin Usaha Perikanan													
	Retribusi Perpanjangan IMTA	97.616.400	17,06%	83.388.000										
	Jumlah	6.165.948.667	-37,90%	9.928.995.410	64,16%	6.048.180.562	-46,21%	11.243.562.004,00	73,30%	6.487.735.865	-27,08%	8.897.450.697	-23,30%	11.600.273.367

2.3.2. Anggaran dan Pendanaan

Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2017 sebesar Rp11.907.901.644. Dari total anggaran tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp7.102.285.522,00 (59,64%). Realisasi Anggaran tersebut untuk melaksanakan 5 (lima) Program dengan kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) Kegiatan.

Selanjutnya jika dilihat dari realisasi anggaran program dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan, jumlah realisasi anggaran tertinggi adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu Rp4.256.233.070,00, kemudian Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.789.283.300,00. Namun, jika dilihat dari keterserapannya, tertinggi adalah Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur dengan capaian keterserapan anggaran sebesar 80,31%.

Tabel 2.18.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014			
								2015	2016	2017
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	15.020.833.700	8.511.897.706,00	3.546.635.215	1.550.000.000,00		10.383.504.326	6.376.359.869,00	3.329.748.920	881.313.900,00	
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah					3.346.464.720,00					1.789.283.300,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9397461350	2.105.906.500,00	30.000.000	60.000.000,00	80.000.000,00	8.404.483.944	1.574.952.884	25.400.000	44.218.000,00	64.245.600,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.786.603.656	7.890.487.645,00	2.150.658.700	1.129.951.700,00	2.262.431.520,00	2.412.896.794	6.626.968.029	1.971.946.493	770.659.573,00	625.810.752,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.835.959.083	7.657.644.199,00	6.116.226.300	4.034.880.400,00	5.396.032.460,15	6.780.513.715	5.940.901.099	4.338.094.853	3.150.965.556,00	4.256.233.070,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.360.487.400		0			1.194.309.100		0		
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	0	0	0			-	246.839.050	0		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.733.478.400	2.334.063.950,00	1.579.944.302	421.562.800,00	822.972.944,00	3.344.600.940	1.804.720.475	1.308.768.979	387.707.800,00	366.712.800,00
JUMLAH	41.134.823.589	28.500.000.000	13.423.464.517	7.196.394.900,00	11.907.901.644,15	32.520.308.819	22.570.741.406	10.973.959.245	5.234.864.829,00	7.102.285.522,00

Keterangan: Tahun 2013-2016 merupakan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah (Sebelum mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pendapatan Daerah)

Tabel 2.19.
Keterserapan Anggaran dan Pertumbuhan Realisasi Anggaran

Program	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	69,13%	74,91%	93,88%	56,86%		-64,49%	-64,98%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					53,47%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89,43%	74,79%	84,67%	73,70%	80,31%	-10,71%	-15,07%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,59%	83,99%	91,69%	68,20%	27,66%	40,79%	6,17%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	76,74%	77,58%	70,93%	78,09%	78,88%	-8,44%	-7,91%
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	87,79%						-100,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							-100,00%
JUMLAH	79,06%	79,20%	81,75%	72,74%	59,64%	-16,13%	-24,65%

Keterangan: Tahun 2013-2016 merupakan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah (Sebelum mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pendapatan Daerah)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas dan informasi yang diperoleh dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

- (1) Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jarak ibukota kabupaten dengan beberapa kecamatan relatif jauh sehingga menghambat pelaksanaan tata kelola, terutama pajak dan retribusi, sesuai dengan standar yang berlaku
- (2) Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah
- (3) Diduga wajib pajak tidak memberi keterangan yang jelas dan benar mengenai jumlah penerimaan dari usaha yang dijalankan
- (4) Wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pemungutan pajak, misal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- (5) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, misalnya keterlambatan wajib pajak dalam mengembalikan SPTPD atau tidak menyetor SPTPD
- (6) Implikasi dari berlakunya peraturan perundangan mengenai kewenangan daerah berdampak pada terbatasnya potensi pendapatan daerah

- (7) Sikap Masyarakat/Wajib Pajak yang masih apatis terkait manfaat yang diterima dari pembayaran pajak
- (8) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak
- (9) Pertumbuhan ekonomi melambat, yang berakibat ketidakstabilan daya beli masyarakat karena pendapatan yang cenderung menurun
- (10) Terjadinya penurunan harga komoditas sektor ekstraktif (migas dan tambang) berdampak pada porsi dana bagi hasil
- (11) Penopang utama perekonomian Kutai Kartanegara masih bertumpu pada sektor primer pertambangan dan penggalian sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga

2.4.2. Peluang

- (1) Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan potensi yang relatif besar dan kesadaran WP yang relatif tinggi.
- (2) Adanya rencana pengelolaan atau PI (*Participating Interest*) Blok Migas Mahakam di Anggana, Kutai Kartanegara. Pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara
- (3) Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan TUPOKSI organisasi
- (4) Adanya beberapa daerah yang telah menerapkan sistem pemungutan dan pembayaran pajak secara *online* sebagai upaya pemberian layanan yang prima bagi WP
- (5) Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat

Bab III

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu sentral berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam rentang waktu tahun 2016-2021 merujuk pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpusat pada upaya Kabupaten Kutai Kartanegara untuk MANDIRI karena memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam, dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar-wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Substansi Visi tersebut dijabarkan dalam Misi **meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah**.

Untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, maka posisi pendapatan asli daerah menjadi salah satu cerminan kemandirian suatu daerah otonom. Bercermin pada capaian kinerja lima tahun yang lalu, rasio kemandirian yang dicapai oleh Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 8,70 persen. Angka rasio kemandirian perlu terus ditingkatkan karena menurut Munir dkk (2004), capaian sebesar 8,70% masih menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang **Sangat Kurang**, karena berada pada rentang nilai 0-10%.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah telah berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja kemandirian keuangan daerah. Namun dalam pelaksanaannya menemui sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Masih minimnya ketersediaan database perencanaan PAD yang berkualitas	Belum tersedianya kajian akademis mengenai potensi PAD secara komprehensif sehingga sulit untuk menentukan target
			Belum adanya <i>Grand Strategi/roadmap</i> pendapatan asli daerah
			Data Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih belum <i>up to date</i>
		Masih rendahnya	Pembangunan dan pengembangan sistem

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kualitas layanan PAD	layanan dalam jaringan (<i>online</i>) belum optimal. Belum optimalnya dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana (termasuk belum meratanya sarana pendukung pungutan PAD di semua kecamatan. Misalnya, masih adanya kantor UPT yang belum definitif milik pemerintah daerah (kontrak)) Masih belum meratanya kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diemban. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan PAD
		Masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi daerah dalam membayar pajak/retribusi daerah	Diduga Wajib Pajak/Retribusi Daerah tidak memberi keterangan yang jelas dan benar mengenai jumlah penerimaan dari usaha yang dijalankan Wajib Pajak/Retribusi Daerah yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pemungutan pajak, misal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, misalnya keterlambatan wajib pajak dalam mengembalikan SPTPD atau tidak menyetor SPTPD Sikap Wajib Pajak/Retribusi Daerah yang masih apatis terkait manfaat yang diterima dari pembayaran pajak

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 (perubahan) sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sebagai berikut:

- (a) **Maju:** Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

- (b) **Mandiri:** Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar-wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- (c) **Sejahtera:** Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.
- (d) **Berkeadilan:** Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar-individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya memuwujudkan visi pembangunan Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, misi pembangunan Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- (1) Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
- (2) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
- (3) Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;**
- (4) Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
- (5) Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
- (6) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- (7) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak

Renstra sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, maka dalam penyusunannya harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu, penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah juga mengacu pada RPJMD agar program kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah selaras dengan tujuan pembangunan RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Pendapatan Daerah berkontribusi untuk mewujudkan Misi yang ada dalam RPJMD, yaitu pada **Misi ke-3** yang berbunyi “**Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah**”.

Upaya peningkatan pembiayaan pembangunan daerah menjadi prioritas untuk dilakukan, dikarenakan Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah. Dengan demikian, masalah keuangan merupakan masalah penting dalam setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu faktor keuangan ini merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kinerja keuangan pemerintah. Pemerintah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini harus mendapat perhatian bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan asset dari daerah sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat. Sehingga akan tercipta daerah yang berdikari dengan menciptakan peluang-peluang usaha dan investasi bagi masyarakat dan menarik investor untuk menanamkan modal dalam pengelolaan potensi unggulan daerah Kutai Kartanegara. Diharapkan pembiayaan pembangunan daerah dapat meningkat dan pendapatan serta asset daerah dapat terkelola dengan maksimal sehingga menghasilkan PAD yang cukup untuk membiayai segala kegiatan pembangunan daerah.

Dalam konteks pencapaian **Misi ke-3**, tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD adalah **“menuju kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi”**, dengan indikator tujuan **“Derajat Otonomi Fiskal”**. Pembiayaan pembangunan daerah merupakan input dalam proses pembangunan, yang bersumber dari pemerintah dan non pemerintah. Saat ini struktur penerimaan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan, atas dasar tersebut dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, maka perlu peningkatan sumber pembiayaan dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah. Skema pembiayaan pembangunan yang di rancang ke depan adalah memperkuat potensi PAD dan meningkatkan peran serta dunia usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana sektor publik yang dilakukan melalui prinsip *win-win-win*, yakni menguntungkan bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Keberhasilan tujuan in dapat dilihat dari derajat otonomi fiskal meningkat pada tahun 2021 sebesar 11.34%.

Tujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya Tarik investasi diwujudkan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

- (a) Meningkatnya daya saing investasi daerah, dapat terwujud dengan menaikan tingkat pertumbuhan nilai investasi (PMA dan PMDN) pada tahun 2021 sebesar 1.98%.
- (b) Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan, dapat terwujud dengan meningkatkan pertumbuhan PAD pada tahun 2021 sebesar 10.61%

Tabel 3.2.
Tujuan, dan Sasaran pada Misi ke-3

Misi 3: Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah							
Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah	Realisasi	Target			
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik Investasi	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	1,50%	1,48%	1,21%	1,40%	1,98%
	Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	Pertumbuhan PAD	33,66%	7,18%	13,56%	15,62%	20%

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Badan Pendapatan Daerah berkontribusi mencapai sasaran **“meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan”** dengan indikator kinerja adalah **“Tingkat pertumbuhan PAD”**. Adapun strategi yang ditetapkan adalah **“Peningkatan PAD melalui percepatan pengembangan investasi”**

Dalam mencapai strategi tersebut, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah **“Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan asset daerah”**. Adapun program yang ditetapkan adalah **“Program peningkatan PAD”** dengan indikator program **“Pertumbuhan pajak daerah”** dan **“Pertumbuhan Retribusi Daerah”**

Adapun konsistensi tujuan, sasaran, indikator daerah, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator program yang diampu oleh Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai Misi ke-3 sebagai berikut:

Tabel 3.3.

**Kontribusi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai Misi Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Misi-3)**

VISI: “TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN”						
MISI 3: Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah						
Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
T3: Menuju kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi	Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	Tingkat Pertumbuhan PAD	Peningkatan PAD melalui percepatan pengembangan investasi	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan asset daerah	Program Peningkatan PAD	Presentase realisasi potensi pajak
						Presentase realisasi potensi retribusi
						Presentase realisasi potensi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan ketersediaan analisis DBH

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang saat ini harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan segenap potensi yang ada.
- 2) Peningkatan kualitas layanan menuju layanan prima berbasis IT.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dibarengi dengan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang memadai dan merata di semua kecamatan.

- 
- 4) Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi daerah dalam membayar pajak/retribusi daerah.

Bab IV

Tujuan dan Sasaran

Tujuan (*goals*) adalah pernyataan umum tentang “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan; sesuatu (*what*) yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Sedangkan sasaran (*objectives*) bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan (penjabaran dari tujuan secara terukur). Sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan perencanaan.

Oleh karena itu, esensi tujuan dan sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah guna menyumbang terhadap pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Daerah sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BAPENDA	Meningkatnya dan Transparansi Akuntabilitas Kinerja BAPENDA	Predikat akuntabilitas kinerja BAPENDA						
2	Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan PAD	33,66%	7,18%	13,56%	15,62%	20%	

Bab V

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah Metode Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT). *SWOT Analysis* merupakan suatu proses merinci keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Badan Pendapatan Daerah ke dalam kategori *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (tantangan), sebagai dasar untuk menentukan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran, sehingga Badan Pendapatan Daerah memiliki keunggulan meraih masa depan yang lebih baik.

Berikut ini hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.

(1) Kekuatan

- (a) Memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, baik undang-undang maupun berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah
- (b) Adanya dana operasional dalam memungut pajak daerah termasuk dana insentif pegawai sehingga memberikan motivasi pada pegawai pemungut pajak
- (c) Fungsi dan Kewenangan (mandat organisasi) yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (d) Jumlah pegawai yang cukup dengan tingkat pendidikan formal pegawai yang memadai.

(2) Kelemahan

- (a) Belum tersedianya kajian akademis mengenai potensi PAD secara komprehensif sehingga sulit untuk menentukan target
- (b) Belum adanya *grand strategi/roadmap* pendapatan asli daerah
- (c) Data Wajib Pajak/Wajib Retribusi masih belum *up to date*
- (d) Pembangunan dan pengembangan sistem layanan dalam jaringan (*online*) belum optimal.
- (e) Belum optimalnya dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana (termasuk belum meratanya sarana pendukung pungutan PAD di semua kecamatan. Misalnya, masih adanya kantor UPT yang belum definitif milik pemerintah daerah (kontrak))
- (f) Masih belum meratanya kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diemban.
- (g) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan PAD

(3) Peluang

- (a) Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan potensi yang relatif besar dan kesadaran WP yang relatif tinggi.
- (b) Adanya rencana pengelolaan atau PI (*Participating Interest*) Blok Migas Mahakam di Anggana, Kutai Kartanegara. Pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara
- (c) Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan TUPOKSI organisasi
- (d) Adanya beberapa daerah yang telah menerapkan sistem pemungutan dan pembayaran pajak secara *online* sebagai upaya pemberian layanan yang prima bagi WP
- (e) Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat

(4) Tantangan

- (a) Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jarak ibukota kabupaten dengan beberapa kecamatan relatif jauh sehingga menghambat pelaksanaan tata kelola, terutama pajak dan retribusi, sesuai dengan standar yang berlaku
- (b) Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah
- (c) Diduga wajib pajak tidak memberi keterangan yang jelas dan benar mengenai jumlah penerimaan dari usaha yang dijalankan
- (d) Wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pemungutan pajak, misal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- (e) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, misalnya keterlambatan wajib pajak dalam mengembalikan SPTPD atau tidak menyetor SPTPD
- (f) Implikasi dari berlakunya peraturan perundangan mengenai kewenangan daerah berdampak pada terbatasnya potensi pendapatan daerah
- (g) Sikap Masyarakat/Wajib Pajak yang masih apatis terkait manfaat yang diterima dari pembayaran pajak
- (h) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak
- (i) Pertumbuhan ekonomi melambat, yang berakibat ketidakstabilan daya beli masyarakat karena pendapatan yang cenderung menurun
- (j) Terjadinya penurunan harga komoditas sektor ekstraktif (migas dan tambang) berdampak pada porsi dana bagi hasil
- (k) Penopang utama perekonomian Kutai Kartanegara masih bertumpu pada sektor primer pertambangan dan penggalian sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga

Berdasarkan hasil identifikasi diatas dapat dirumuskan formulasi strategi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1
Formulasi Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

INTERNAL EXTERNAL	KEKUATAN (<i>STRENGTHS</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i>)
	1) Memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, baik undang-undang maupun berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah 2) Adanya dana operasional dalam memungut pajak daerah termasuk dana insentif pegawai sehingga memberikan motivasi pada pegawai pemungut pajak 3) Fungsi dan Kewenangan (mandat organisasi) yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah	1) Belum tersedianya kajian akademis mengenai potensi PAD secara komprehensif sehingga sulit untuk menentukan target 2) Belum adanya <i>grand strategi/roadmap</i> pendapatan asli daerah 3) Data WP masih belum sepenuhnya <i>up to date</i> 4) Masih belum meratanya kompetensi pegawai sesuai tuntutan tugas kedinasan 5) Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan PAD

	dan Peraturan Bupati 4) Jumlah pegawai yang cukup dengan tingkat pendidikan formal pegawai yang memadai.	6) Belum optimalnya dukungan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana (termasuk belum meratanya sarana pendukung pungutan PAD di semua kecamatan. Misalnya, masih adanya kantor UPT yang belum definitif milik pemerintah daerah (kontrak)
PELUANG (OPPORTUNITIESS) 1) Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 2) Adanya rencana pengelolaan atau PI (<i>Participating Interest</i>) Blok Migas Mahakam di Anggana, Kutai Kartanegara. Pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kutai Kartanegara 3) Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan TUPOKSI organisasi 4) Adanya beberapa daerah yang telah menerapkan sistem pemungutan dan pembayaran pajak secara <i>online</i> 5) Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat	STRATEGI SO (1) Pengembangan sistem PAD <i>online</i> untuk semua layanan PAD (S:1,3,4); O:(1), (3), (4), (5) (2) Peningkatan koordinasi pengelolaan atau PI Blok Migas (S:1,3,4); O:(2)	STRATEGI WO (1) Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pendapatan daerah (PAD) (W: (1), (2); O: (1) (2) Peningkatan kualitas SDM aparatur (W: (4); O: (1), (4), (5))
TANTANGAN (THREATS) 1) Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jarak ibukota kabupaten dengan beberapa kecamatan relatif jauh sehingga menghambat pelaksanaan tata kelola, terutama pajak dan retribusi, sesuai dengan standar yang berlaku 2) Diduga wajib pajak tidak memberi keterangan yang jelas dan benar mengenai jumlah penerimaan dari usaha yang dijalankan 3) Wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pemungutan pajak, misal wajib pajak tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 4) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, misalnya keterlambatan wajib pajak dalam mengembalikan SPTPD atau tidak menyetor SPTPD 5) Sikap Masyarakat/Wajib Pajak yang masih apatis terkait manfaat yang diterima dari pembayaran pajak 6) Perubahan jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang begitu cepat sehingga akan menyulitkan untuk melakukan pendataan wajib pajak 7) Pertumbuhan ekonomi melambat 8) Terjadinya penurunan harga komoditas sektor ekstraktif (migas dan tambang) berdampak pada porsi dana bagi hasil 9) Penopang utama perekonomian Kutai Kartanegara masih bertumpu pada sektor primer pertambangan dan penggalian sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga	STRATEGI ST (1) Pemetaan potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah (S:1,3,4); T:(7), (8), (9)) (2) Peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (S:1,2,3,4); T: (2), (3), (4), (5)) (3) Pemberian insentif bagi aparatur khususnya pemungut PAD di daerah terpencil (S: (1), (2), (3); T: (1))	STRATEGI WT (1) Peningkatan ketersediaan database perencanaan yang komprehensif dan <i>up to date</i> (W: (3); T: (1), (2), (3), (6)) (2) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata untuk menunjang pelayanan prima (W: (6); T: (1), (4) (3) Peningkatan dan inisiasi kerjasama antar-instansi yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber PAD (W: (5); T:(8), (9), (10))

Berdasarkan hasil analisa SWOT yang telah dilakukan diatas, strategi yang telah berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Pengembangan sistem PAD *online* untuk semua layanan PAD
- (2) Peningkatan koordinasi pengelolaan atau PI Blok Migas
- (3) Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pendapatan daerah (PAD)
- (4) Peningkatan kualitas SDM aparatur
- (5) Pemetaan potensi baru bagi Pendapatan Asli Daerah
- (6) Peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
- (7) Pemberian insentif bagi aparatur khususnya pemungut PAD di daerah terpencil
- (8) Peningkatan ketersediaan database perencanaan yang komprehensif dan *up to date*
- (9) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata untuk menunjang pelayanan prima
- (10) Peningkatan dan inisiasi kerjasama antar-instansi yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber PAD

Selanjutnya strategi tersebut perlu dipilih dan di *regrouping* sehingga menghasilkan strategi strategis sebagai berikut:

- (1) Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi.
- (2) Peningkatan ketersediaan database yang komprehensif dan *up to date*.
- (3) Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi Daerah dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah.
- (4) Peningkatan kualitas layanan PAD.

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.			
Misi	1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat. 2. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah.			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BAPENDA.	Meningkatnya dan Transparansi Akuntabilitas Kinerja BAPENDA.	• Percepatan penyelenggaraan reformasi birokrasi. • Peningkatan ketersediaan database yang komprehensif dan up to date. • Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak/Retribusi Daerah dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah. • Peningkatan kualitas layanan PAD.	▪ Penyelenggaraan reformasi birokrasi terukur. ▪ Pengembangan sistem layanan online untuk semua layanan Pajak Daerah. ▪ Penyediaan data dan informasi potensi pendapatan daerah. ▪ Penerapan/implementasi grand strategi/roadmap Pendapatan Asli Daerah. ▪ Peningkatan kesadaran Wajib Pajak/Retribusi dan penegakan hukum (law enforcement) pada Wajib Pajak/Retribusi yang tidak taat bayar. ▪ Peningkatan koordinasi dan kerjasama pajak dan retribusi daerah.
2.	Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		

Bab VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Penyajian program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai 2017 sampai dengan 2021 serta kondisi di akhir perencanaan.

Perencanaan program dan kegiatan setiap tahun mulai 2017 sampai dengan 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya Renja Badan Pendapatan Daerah diselaraskan dengan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD untuk menetapkan program dan kegiatan dalam Renja Badan Pendapatan Daerah.

Matriks program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan dana indikatif masing-masing kegiatan **terlampir** dalam dokumen Renstra ini.

Bab VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah **indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD**. Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut serta penetapan indikator kinerja daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam Tabel 6.1. **Indikator kinerja yang disajikan hanya indikator kinerja yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat memberikan gambaran kontribusi langsung Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 melalui kontribusi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah**. Dengan demikian, indikator yang lebih spesifik dan khas Perangkat Daerah namun tidak dimuat dalam RPJMD tidak disajikan namun tetap menjadi bagian dari tolok ukur dan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017 (Realisasi)	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan PAD	4,94%	-35,19%	33,66%	7,18%	13,56%	15,62%	20%	20%

Bab VIII

Penutup

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah ini disusun dengan memperhatikan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Selanjutnya dalam penjabaran program/kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang/SubBidang dan Sekretariat/SubBagian, dan dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Setiap awal tahun, renstra akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*) dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 hendaknya dapat diimplementasikan dengan tanggungjawab moral dan dedikasi yang tinggi, dengan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan/sinergisitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MATRIKS
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Pajak																	
		Pertumbuhan Retribusi																	
		Pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
		Program Peningkatan PAD					1,877,644,160.00		1,629,735,100.00		6,509,012,100.00		3,587,300,000.00		5,710,000,000.00				
			Persentase realisasi potensi pajak									5							
			Persentase realisasi potensi retribusi									5							
			Persentase realisasi potensi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan									5							
		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kota bangun	Jumlah SPPT/WP di Wilayah Kecamatan Kota Bangun dan Kenohan		4640 SPPT	100,000,000.00	18955 SPPT, 1500 WP	49,963,800.00	17217 SPPT, 500 WP	350,000,000.00	6019 WP	100,000,000.00	6019 WP	150,000,000.00			Bapenda		
		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara jawa	Jumlah SPPT/WP di Wilayah Kecamatan Muara Jawa dan Samboja		8630 SPPT	100,000,000.00	30333 SPPT, 67 WP	49,973,800.00	31000 SPPT, 70 WP	470,867,400.00	3500 WP	150,000,000.00	3500 WP	200,000,000.00			Bapenda		
		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan tenggarong	Jumlah SPPT/WP di Wilayah Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang		1528 SPPT	100,000,000.00	47146 SPPT	47,338,800.00	91574 SPPT, 1500 WP	200,000,000.00	8000 WP	100,000,000.00	75000 SPPT	150,000,000.00			Bapenda		
		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan loa janan	Jumlah SPPT/WP di Wilayah Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu		667 SPPT, 10 WP	100,000,000.00	27666 SPPT, 236 WP	49,838,800.00	29764 SPPT, 240 WP	250,000,000.00	500 WP	100,000,000.00	31000 SPPT, 260 WP	150,000,000.00			Bapenda		
		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara badak	Jumlah SPPT/WP di Wilayah Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu		1413 SPPT	100,000,000.00	13519 SPPT, 1000 WP	49,993,800.00	13972 SPPT, 1000 WP	300,000,000.00	1750 WP	150,000,000.00	14100 SPPT	200,000,000.00			Bapenda		
		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sebulu	Jumlah SPPT/WP di Wilayah Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman		2476 SPPT	100,000,000.00	14593 SPPT, 35 WP	48,433,800.00	15967 SPPT, 40 WP	200,000,000.00	3300 WP	100,000,000.00	16500 SPPT, 50 WP	150,000,000.00			Bapenda		
		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan kembang janggut	Jumlah SPPT/WP di Wilayah Kecamatan Kembang Janggut dan Tabang		4484 SPPT	100,000,000.00	4484 SPPT	49,963,800.00	6597 SPPT, 1500 WP	200,000,000.00	75 WP	150,000,000.00	12560 SPPT, 2600 WP	200,000,000.00			Bapenda		
		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan muara muntai	Jumlah SPPT/WP di Wilayah Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis		45 SPPT	100,000,000.00	4322 SPPT	49,124,000.00	2744 SPPT	400,000,000.00	1005 WP	100,000,000.00	5300 SPPT	150,000,000.00			Bapenda		
		Penguatan UPT pajak daerah kecamatan sanga sanga	Jumlah SPPT/WP di Wilayah Kecamatan Sanga Sanga dan Anggana		1104 SPPT, 1 WP	100,000,000.00	1738 SPPT	49,328,800.00	8252 SPPT, 3 WP	200,000,000.00	1949 WP	150,000,000.00	14976 SPPT, 1500 WP	200,000,000.00			Bapenda		
			Persentase Potensi Objek Pajak Yang Terdaftar			100		100.00		100.00		100.00		100.00				Bapenda	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Optimalisasi pendaftaran dan pendataan pajak	Pendaftaran Jumlah wajib pajak (9 wajib pajak) dan Pendataan jumlah data objek pajak		5,603	56.610.360.00	5,946	80.408.600.00	6,359	800.014.700.00	1000 WP	500.000.000.00	6,677	600.000.000.00			Bapenda	
			Facilitasi penetapan pajak	Jumlah surat ketetapan pajak daerah		4,649	55.000.000.00	8,419	400.000.000.00	8,840	400.000.000.00	11 Jenis Pajak	75.000.000.00	9.284.00	100.000.000.00			Bapenda	
			Pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan P2	Jumlah SPPT yang tercetak		46,360	-	177,897	49.250.000.00	180.000	50.000.000.00	1 Dokumen	75.000.000.00	270.000.00	250.000.000.00			Bapenda	
				Persentase Penyelesaian Piutang Pajak dan Non Pajak		100		100		100		100		100				Bapenda	
			Monitoring dan Evaluasi Penagihan Piutang Non Pajak	Jumlah objek piutang non pajak		150	-	175	-	200	-	100 WP	85.000.000.00	225	85.000.000.00			Bapenda	
			Monitoring dan evaluasi penagihan piutang pajak daerah	Jumlah objek piutang pajak		151	286.033.800.00	169	290.000.000	296	290.000.000.00	11 Jenis Pajak	200.000.000.00	325	200.000.000.00			Bapenda	
			Facilitasi, konsultasi dan koordinasi penyelesaian keberatan, restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah	Jumlah pelayanan keberatan/restitusi		7	-	10	74.584.600.00	80	250.000.000.00	2 Kasus	85.000.000.00	211	250.000.000.00			Bapenda	
				Cakupan ketersediaan laporan realisasi Pendapatan Daerah tepat waktu		100		100		100		100		100				Bapenda	
			Pengelolaan Benda/Surat Berharga	Jumlah objek benda/surat berharga		12	55.000.000.00	12	59.670.000.00	12	80.000.000.00	13 Jenis Benda/Surat Berharga	175.000.000.00	12	125.000.000.00			Bapenda	
			Verifikasi dan validasi piutang daerah	Jumlah daftar piutang		24	125.000.000.00	24	140.000.000.00	24	340.000.000.00	12 Dokumen	100.000.000.00	12	100.000.000.00			Bapenda	
			Penyusunan laporan pendapatan daerah	Jumlah dokumen laporan			-		-		-	12 Laporan	175.000.000.00	12	300.000.000.00			Bapenda	
			Facilitasi hasil audit BPK terhadap pendapatan dan piutang daerah	Jumlah penyelesaian audit BPK			-		-		-	3 Dokumen	122.300.000.00	3	125.000.000.00			Bapenda	
				Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pendapatan		100		100		100		100		100				Bapenda	
			Penyusunan target pendapatan	Jumlah dokumen		2	-	2.00	-	2	150.000.000.00	1 Dokumen	150.000.000.00	2	200.000.000.00			Bapenda	
			Sosialisasi pajak daerah	Jumlah peserta		-	-	-	-	150	376.090.000.00	500 Peserta	150.000.000.00	150	150.000.000.00			Bapenda	
			Penyusunan draft/perubahan regulasi pajak daerah	Jumlah regulasi		-	-	-	-	1	232.040.000.00	1 Regulasi	225.000.000.00	1	225.000.000.00			Bapenda	
			Pengembangan pelayanan pendapatan daerah berbasis teknologi dan informasi (PAD Cerdas)	Jumlah aplikasi		-	-	-	-	-	70.000.000.00	1 Aplikasi	70.000.000.00	-	-			Bapenda	
			Pembinaan dan pengawasan pemungutan pajak daerah	Jumlah dokumen		1	400.000.000.00	1	91.862.500.00	1	400.000.000.00	12 Dokumen	100.000.000.00	1	200.000.000.00			Bapenda	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Mengoptimalkan pendapatan Dana Bagi Hasil	Persentase Realisasi DBH	Facilitasi kinerja retribusi daerah	Jumlah rapat koordinasi			-	-	-	-	-	-	1 Rapat	50,000,000.00	6	100,000,000.00			Bapenda			
		Facilitasi kinerja perusahaan daerah	Jumlah rapat koordinasi			-	-	-	-	-	-	1 Rapat	50,000,000.00	6	1,000,000,000.00			Bapenda			
		Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah									12 Dokumen	100,000,000.00	12 Dokumen	150,000,000.00						
		Kegiatan Gebyar Pajak Daerah	Jumlah WP yang membayar pajak daerah			-	-	-	-	11 objek pajak daerah	500,000,000.00	-	-	-	-						
																		Bapenda			
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						300,000,000.00		66,294,100.00	70		300,000,000.00	70	800,000,000.00	70	700,000,000.00				
			Jumlah analisis DBH																Bapenda		
		Facilitasi Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah	Jumlah Koordinasi/Rapat Koordinasi			-		300,000,000.00		-	66,294,100.00	117	300,000,000.00	6 Rapat	800,000,000.00	124	700,000,000.00		Bapenda		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran			80	5,888,883,894.15		80	3,268,802,775.00		80	4,805,647,542.00		80	4,725,065,639.00		80	5,000,720,106.24		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 bulan (4 jenis rekening belanja)		800,000,000.00		12 bulan (4 jenis rekening belanja)	548,343,355.00		12 bulan (4 jenis rekening belanja)	870,799,200.00		12 bulan (4 jenis rekening belanja)	801,000,000.00		12 bulan (4 jenis rekening belanja)	1,072,999,992.00	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan			45 ASN		340,000,000.00		45 ASN	354,331,800.00		45 ASN	454,804,300.00		45 ASN	480,405,000.00		45 ASN	354,333,000.00	
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK					200,000,000.00			149,815,000.00			200,000,000.00		44 jenis ATK	200,000,000.00			200,000,000.00	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan			50 jenis barang cetakan		200,000,000.00		50 jenis barang cetakan	99,445,000.00		50 jenis barang cetakan	200,000,000.00		35 jenis barang cetakan	200,000,000.00		50 jenis barang cetakan	200,000,000.00	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dari langganan media massa lokal serta peraturan perundang-undangan pemerintah			18667 eksemplar		80,000,000.00		18667 eksemplar	80,000,000.00		18667 eksemplar	80,000,000.00		18667 eksemplar	30,000,000.00		18667 eksemplar	30,000,000.00	
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jamuan makanan dan minuman			1550 porsi makan rapat dan 2870 porsi makan tamu		250,000,000.00		1550 porsi makan rapat dan 2870 porsi makan tamu	34,834,050.00		1550 porsi makan rapat dan 2870 porsi makan tamu	200,000,000.00		6421 Porsi Makan Rapat/Tamu	315,220,000.00		1550 porsi makan rapat dan 2870 porsi makan tamu	200,000,000.00	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah			12 bulan		3,197,442,454.15		12 bulan	1,264,847,676.00		12 bulan	1,923,787,722.00		12 bulan	1,638,681,600.00		12 bulan	1,638,696,000.00	
		Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran			66 THL, PHL, penjaga malam, motoris, dll		811,441,440.00		66 THL, PHL, penjaga malam, motoris, dll	732,931,394.00		66 THL, PHL, penjaga malam, motoris, dll	861,256,320.00		56 THL	794,759,039.00		66 THL, PHL, penjaga malam, motoris, dll	1,039,691,114.24	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan surat menyurat			12 bulan		10,000,000.00		12 bulan	4,254,500.00		12 bulan	15,000,000.00		12 bulan	15,000,000.00		12 bulan	15,000,000.00	
		Penataan arsip perangkat daerah	Jumlah dokumen arsip			-		-		-	-		-	1000 arsip	250,000,000.00		1000 arsip	250,000,000.00			Bapenda

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		80	705,000,000.00	80.00	786,532,032.00	80.00	2,569,501,200.00	80.00	5,508,833,000.00	80.00	2,869,752,000.00		80		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		12 bulan (4 jenis pemeliharaan : kebersihan gedung, gedung, taman dan instalasi air bersih/air kotor)	190,000,000.00	12 bulan (4 jenis pemeliharaan : kebersihan gedung, gedung, taman dan instalasi air bersih/air kotor)	313,730,500.00	12 bulan (4 jenis pemeliharaan : kebersihan gedung, gedung, taman dan instalasi air bersih/air kotor)	390,892,800.00	12 bulan (4 jenis pemeliharaan : kebersihan gedung, gedung, taman dan instalasi air bersih/air kotor)	250,000,000.00	12 bulan (4 jenis pemeliharaan : kebersihan gedung, gedung, taman dan instalasi air bersih/air kotor)	300,000,000.00			Bapenda	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional		12 bulan (11 unit kendaraan roda-4, 27 unit kendaraan roda-2)	250,000,000.00	12 bulan (11 unit kendaraan roda-4, 27 unit kendaraan roda-2)	121,360,200.00	12 bulan (11 unit kendaraan roda-4, 27 unit kendaraan roda-2)	250,000,000.00	12 bulan (11 unit kendaraan roda-4, 27 unit kendaraan roda-2)	220,500,000.00	12 bulan (11 unit kendaraan roda-4, 27 unit kendaraan roda-2)	250,000,000.00			Bapenda	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		12 bulan (6 jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : mesin porporasi, PC, printer, listrik, elektronik dan mesin photocopy)	200,000,000.00	12 bulan (6 jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : mesin porporasi, PC, printer, listrik, elektronik dan mesin photocopy)	157,939,292.00	12 bulan (6 jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : mesin porporasi, PC, printer, listrik, elektronik dan mesin photocopy)	300,000,000.00	12 bulan (6 jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : mesin porporasi, PC, printer, listrik, elektronik dan mesin photocopy)	303,576,000.00	12 bulan (6 jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : mesin porporasi, PC, printer, listrik, elektronik dan mesin photocopy)	300,000,000.00			Bapenda	
			Penyediaan gedung tempat kerja	Jumlah sewa gedung kantor UPT		-	-	-	-	-	-	1 kantor UPT	71,252,000.00	1 kantor UPT	71,252,000.00			Bapenda	
			Pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah berbasis online	Terlaksananya pemutakhiran dan penyediaan sistem aplikasi pajak daerah		-	-	-	-	-	-	1 aplikasi (untuk 5 UPT Pajak Daerah)	300,000,000.00	-	-			Bapenda	
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun kantor		3 sarana dan prasarana serta 1 renovasi tempat pelayanan	65,000,000.00	3 sarana dan prasarana serta 1 renovasi tempat pelayanan	193,502,040.00	3 sarana dan prasarana serta 1 renovasi tempat pelayanan	1,060,608,400.00	100 Unit	3,298,500,000.00	3 sarana dan prasarana serta 1 renovasi tempat pelayanan	1,108,500,000.00			Bapenda	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional		-	-	-	-	-	340,000,000.00	15 Unit	537,005,000.00	-	540,000,000.00			Bapenda	
			Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor (pagar, atap parkir roda dua, tempat parkir paving)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		-	-	-	-	1 sarana dan prasarana	228,000,000.00	3 sarana dan prasarana	228,000,000.00	-	-			Bapenda	
			Pembangunan gedung kantor UPT	Jumlah gedung kantor UPT		-	-	-	-	-	-	1 gedung kantor UPT	300,000,000.00	-	300,000,000.00			Bapenda	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		75	80,000,000.00	80.00	198,000,000.00	80.00	450,000,000.00	85.00	436,671,761.00	90.00	550,000,000.00				
			Pameran dan promosi	Jumlah pameran dan kegiatan promosi yang dilaksanakan		2 pameran serta belanja promosi pajak daerah (klien, banner, spanduk, dll)	80,000,000.00	2 pameran serta belanja promosi pajak daerah (klien, banner, spanduk, dll)	40,000,000.00	2 pameran serta belanja promosi pajak daerah (klien, banner, spanduk, dll)	100,000,000.00	2 pameran serta belanja promosi pajak daerah (klien, banner, spanduk, dll)	75,000,000.00	2 pameran serta belanja promosi pajak daerah (klien, banner, spanduk, dll)	100,000,000.00			Bapenda	
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		-	-	-	-	30 ASN	350,000,000.00	30 ASN	261,671,761.00	30 ASN	350,000,000.00			Bapenda	
			Validasi data dan informasi kepegawaian	Jumlah dokumen		-	387 data ASN	158,000,000.00	158,000,000.00	387 data ASN	158,000,000.00	331 data ASN	100,000,000.00	387 data ASN	100,000,000.00			Bapenda	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Capaian Kinerja		100	9,829,889,142.00	100.00	6,911,059,095.00	1,000.00	-	100.00	571,445,600.00	100.00	802,180,000.00			Bapenda	
			Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP)	Jumlah dokumen		1 dokumen	101,697,800.00	1 dokumen	111,697,800.00	1 dokumen	156,697,800.00	1 dokumen	156,696,800.00	1 dokumen	160,000,000.00			Bapenda	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Peningkatan manajemen asset barang	Jumlah dokumen		4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	103,409,600.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	100,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	125,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	75,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	75,000,000.00			Bapenda	
			Penyusunan prognosis dan laporan keuangan	Jumlah dokumen		-	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	50,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	75,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	50,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	75,000,000.00			Bapenda		
			Penyusunan perjanjian kinerja dan LPPD	Jumlah dokumen		2 dokumen	54,869,400.00	2 dokumen	46,769,400.00	2 dokumen	57,569,400.00	2 dokumen	57,568,800.00	2 dokumen	60,000,000.00			Bapenda	
			Penyusunan rencana kerja (RENJA), RKA DPA dan RKAP DPPA	Jumlah dokumen		3 dokumen	99,203,744.00	3 dokumen	121,380,344.00	3 dokumen	132,180,344.00	3 dokumen	132,180,000.00	3 dokumen	132,180,000.00			Bapenda	
			Validasi dan konfirmasi data penerimaan PAD pada bendahra penerimaan	Jumlah dokumen		4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	130,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	130,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	130,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	100,000,000.00	4 dokumen (1 dokumen/1 triwulan)	100,000,000.00			Bapenda	
			Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen		-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	200,000,000.00			Bapenda			
							9,340,708,598.00		6,351,211,551.00		-		15,629,316,000.00		15,632,652,106.24				

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAEARH

Ir. H. TOTOK HERU SUBROTO, M.Si
NIP. 19630827 199003 1 012